

**EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM  
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN  
(Studi Kasus Petani Apel Desa Gubuklakah Kecamatan Poncokusumo  
Kabupaten Malang)**

***Puspa Sari<sup>1</sup>, Khoiron<sup>2</sup>, Agus Zainal Abidin<sup>3</sup>***

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia  
Email : [puspasari1728@gmail.com](mailto:puspasari1728@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Malang merupakan daerah di Jawa Timur yang dikenal sebagai penghasil apel dalam skala besar, terutama di Kecamatan Poncokusumo yang terdiri dari 17 desa, dengan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Salah satu desa yang paling produktif dalam menghasilkan apel adalah Desa Gubuklakah, dengan jumlah penduduk sekitar 3.466 jiwa dan sekitar 1.352 di antaranya bekerja sebagai petani. Pada tahun 2017, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang meluncurkan program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) bekerja sama dengan Kemenristek Dikti dan Balitbangda Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan memulihkan produksi apel melalui pendekatan Agro Ekowisata yang mencakup klaster sapi perah, apel, sayuran, serta industri kreatif seperti makanan, minuman, dan kerajinan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah terbatasnya akses petani terhadap teknologi dan informasi pertanian modern. Banyak petani masih bergantung pada metode budidaya konvensional yang menghambat peningkatan produktivitas secara optimal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan SIDa dalam menangani permasalahan petani apel di Desa Gubuklakah, yang dilatarbelakangi oleh penurunan produksi, alih fungsi lahan, kualitas apel yang menurun, mahalnya harga pupuk, dan kompleksitas proses budidaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan data primer dan sekunder dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan mengacu pada teori evaluasi kebijakan Stuart S. Nagel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program SIDa di Desa Gubuklakah masih menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Secara khusus, efisiensi program terganggu oleh terbatasnya akses serta rendahnya pemahaman petani terhadap teknologi pertanian modern seperti irigasi hemat air, pupuk hayati, dan metode tanam terpadu, yang disebabkan oleh rendahnya literasi teknologi, minimnya pendampingan, serta kurangnya pelatihan praktis yang menasar kelompok petani kecil.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Problematika Pertanian, Sistem Inovasi Daerah

**Pendahuluan**

Kecamatan Poncokusumo di Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah penghasil apel utama di Provinsi Jawa Timur. Keunggulan wilayah ini didukung oleh kondisi agroklimat yang ideal, seperti ketinggian antara 700 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut dan suhu udara berkisar antara 16°C hingga 22°C. Keadaan ini sangat mendukung pertumbuhan dan kualitas buah apel yang dihasilkan (Setiawan, 2018:02). Salah satu desa yang berkontribusi besar terhadap produksi apel adalah Desa Gubuklakah, di mana sekitar 1.352 dari 3.466 penduduknya berprofesi sebagai petani. Aktivitas budidaya apel menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, dengan hasil panen yang tidak hanya dijual dalam bentuk segar, tetapi juga diolah menjadi produk turunan seperti sari apel dan keripik apel.

Untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi tantangan dalam budidaya apel, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) meluncurkan program Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kemenristek Dikti dan Balitbangda Provinsi Jawa Timur, yang difokuskan pada penguatan sektor pertanian melalui klaster seperti apel, sayuran, dan industri kreatif (Rahmawati & Haryanto, 2020:98). Dalam praktiknya, SIDa mencakup pelatihan petani, peremajaan bibit, serta pengendalian hama. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak petani yang kesulitan mengakses teknologi modern dan mengandalkan metode tradisional. Penurunan hasil panen dan alih fungsi lahan menjadi indikasi

lemahnya efektivitas kebijakan tersebut (Damanik, 2020:365).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, terjadi penurunan signifikan produksi apel di Poncokusumo dari tahun 2020 hingga 2023, dengan jumlah panen menurun dari 1.821.293 kuintal menjadi hanya 953.556 kuintal. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan subsidi pupuk dan tidak berkelanjutannya dukungan kebijakan pasca-2019 (Haryanto, 2020:34; Saragih, 2021:76). Evaluasi terhadap implementasi SIDA sangat diperlukan, mengingat lemahnya sistem dokumentasi dan monitoring program ini (Sitorus, 2019:89). Inovasi berkelanjutan dalam bentuk teknologi pertanian modern, penyediaan data berbasis riset, serta pelatihan petani menjadi kunci penting dalam mendorong transformasi pertanian apel menuju sistem pertanian yang lebih adaptif dan berkelanjutan (Purba et al., 2020:83; Ariefin et al., 2022:13).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas tentang problematika petani apel desa gubuklakah dalam meningkatkan produktivitas pertanian maka perumusan masalah pada penelitian ini, Bagaimana proses evaluasi kebijakan program Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dalam meningkatkan produktivitas pertanian apel Desa Gubuklakah Kabupaten Malang?

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses analitis yang dilakukan secara sistematis untuk menilai pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan, mencakup aspek efektivitas, efisiensi, relevansi, hingga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Proses ini melibatkan penelaahan terhadap implementasi kebijakan serta hasil-hasil yang ditimbulkannya, dengan mengandalkan pendekatan multidimensional dan data empiris. Stuart S. Nagel (2001:02) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik mencakup pemilihan cara terbaik dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial, ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan internasional. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kajian menyeluruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Stuart S. Nagel mengembangkan metode evaluasi kebijakan yang menekankan pada pendekatan yang lebih terpadu dan memanfaatkan teknologi, dengan mengintegrasikan analisis multidimensi serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai kriteria. Evaluasi ini juga didukung oleh penggunaan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi analisis. Menurut Nagel, terdapat enam tren utama dalam

pendekatan evaluasi kebijakan, yaitu *multiple dimensions on multiple goals, missing information, allocation analysis, multiple and conflicting constraints, multiple prediction*, dan *simplicity* (Nagel, 2001:194).

### **Sistem Inovasi Daerah (SIDA)**

Sistem Inovasi Daerah (SIDA) merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghasilkan, mengelola, dan mengaplikasikan inovasi guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa SIDA mencakup keseluruhan proses dalam satu sistem yang bertujuan mengembangkan inovasi melalui sinergi antara institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga pendukung inovasi, dunia usaha, serta masyarakat di tingkat daerah. Dalam implementasinya, SIDA memainkan peran penting sebagai sarana integrasi antara sumber daya, teknologi, dan inovasi guna menjawab berbagai tantangan lokal. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan solusi yang relevan dengan kebutuhan daerah dan memaksimalkan potensi lokal melalui pendekatan yang sistematis, kolaboratif, inovatif, menyeluruh, dan berkelanjutan (Asmoro & Susanto, 2023:01).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami situasi objek penelitian dalam konteks alaminya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Proses validasi digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peneliti terhadap pendekatan kualitatif, termasuk penguasaan teori, pengetahuan tentang isu yang diteliti, serta kesiapan dan kapabilitas dalam melakukan penelitian lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menentukan fokus studi, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan dan evaluasi data, menganalisis serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh, hingga menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Proses analisis data mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Pembahasan**

#### **Evaluasi Kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)**

Menurut Stuart S Nagel 2001, evaluasi kebijakan mempunyai 5 metode evaluasi yaitu:

##### **1. Multiple Dimensions On Multiple Goals**

##### **Dimensi Efisiensi (Penurunan Produktivitas Pertanian Apel)**

Hasil wawancara dengan petani apel di Desa Gubuklakah mengungkapkan bahwa produksi apel mengalami penurunan drastis sejak tahun 2017, dengan kondisi terburuk terjadi setelah tahun 2020. Penyebab utama dari rendahnya tingkat produktivitas ini adalah masih digunakannya metode pertanian tradisional dan kurangnya penerapan teknologi dalam proses budidaya apel.

Permasalahan efisiensi dalam budidaya apel di Desa Gubuklakah disebabkan oleh rendahnya penerapan teknologi pertanian dan terbatasnya subsidi pupuk. Petani masih mengandalkan metode tradisional yang mudah diterapkan, namun kurang efektif dalam meningkatkan hasil panen. Melalui program SIDA, efisiensi seharusnya dapat ditingkatkan dengan inovasi budidaya, pendampingan teknologi, dan perluasan akses pasar.

Meski demikian, petani menghadapi kendala dalam adopsi teknologi karena dianggap rumit dan mahal. Kenaikan harga pupuk juga memperburuk keadaan. Menurut teori evaluasi kebijakan Stuart S. Nagel, efisiensi tercapai jika manfaat melebihi biaya, sehingga kebijakan yang baik adalah yang mampu mencapai hasil maksimal dengan sumber daya minimal.

#### **Dimensi Efektivitas ( Menurutnya Efektivitas Pertanian Yang Ditandai Alih Fungsi Lahan)**

Hasil wawancara dengan petani apel di Desa Gubuklakah menunjukkan bahwa turunnya produktivitas telah mendorong mereka untuk mengganti komoditas tanamannya dengan yang dianggap lebih menguntungkan, seperti jeruk, alpukat, dan sayuran. Faktor utama dari peralihan ini adalah sulitnya perawatan tanaman apel dan penurunan kualitas hasil panen. Sebuah kebijakan yang efektif seharusnya mampu mencapai target dengan hasil optimal, namun dalam kasus ini, kebijakan yang ada belum berhasil memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi petani dalam mempertahankan apel sebagai komoditas unggulan desa.

Efektivitas kebijakan SIDA dalam pengembangan apel di Desa Gubuklakah masih rendah karena belum memberikan dampak nyata bagi petani. Alih fungsi lahan terjadi akibat produktivitas apel yang menurun, dipicu oleh perawatan yang rumit, serangan hama, dan kualitas panen yang menurun. Pelatihan dari pemerintah tidak berkelanjutan, sehingga petani kesulitan mengadopsi teknologi baru. Program inovasi seharusnya disertai pendampingan jangka panjang dan subsidi pupuk yang konsisten.

Kebijakan yang efektif seharusnya mampu mencapai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi petani. Namun, tingginya alih fungsi lahan dan kurangnya solusi atas permasalahan teknis menunjukkan bahwa kebijakan SIDA belum berjalan optimal. Untuk meningkatkan efektivitas,

diperlukan dukungan berkelanjutan, akses teknologi yang mudah, serta pelatihan dan pemantauan yang terus menerus.

#### **Dimensi Keberlanjutan ( Pelatihan dan Pemberian Subsidi Pupuk)**

Wawancara dengan petani di Desa Gubuklakah mengungkapkan bahwa program subsidi pupuk dari pemerintah hanya berlangsung antara tahun 2017 hingga 2019. Setelah program tersebut dihentikan, lonjakan harga pupuk membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan produksi mereka. Sebuah kebijakan idealnya dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang, bukan hanya manfaat sementara. Namun, dalam kasus ini, ketiadaan strategi lanjutan setelah penghentian subsidi menyebabkan petani kesulitan mempertahankan usahanya, sehingga banyak yang memilih beralih ke komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan dan mudah dikelola.

Program SIDA di Desa Gubuklakah yang awalnya ditujukan untuk pengembangan apel tidak berjalan konsisten, hanya aktif antara 2017–2019. Setelah subsidi pupuk dan pelatihan dihentikan, petani kesulitan mengelola pertanian apel dan banyak yang beralih ke komoditas lain yang lebih mudah dan menguntungkan, hingga akhirnya program SIDA tidak lagi berjalan pada 2025. Kurangnya strategi keberlanjutan menunjukkan lemahnya perencanaan program. Kebijakan seharusnya mencakup pendampingan jangka panjang, dukungan yang stabil, serta evaluasi berkala agar tetap relevan dan efektif. Tanpa hal tersebut, program tidak mampu memberi dampak jangka panjang bagi petani.

#### **2. Missing Information**

##### **Laporan Program Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Sebagai Informasi Data Untuk Evaluasi Kebijakan**

Hasil wawancara dengan BALITBANGDA menunjukkan bahwa evaluasi program SIDA tidak disusun dalam bentuk dokumen khusus, melainkan hanya tercantum dalam laporan akhir yang berisi pemantauan bulanan budidaya apel di Desa Gubuklakah. Laporan ini tidak menyertakan analisis mendalam terhadap faktor keberhasilan atau kegagalan program, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan karena keputusan yang diambil tidak didukung data yang komprehensif. Selain mencantumkan kondisi lapangan, capaian, kendala, dan rekomendasi, laporan tersebut juga belum mengulas secara rinci dampak terhadap kesejahteraan petani, keberhasilan produksi, maupun efektivitas penggunaan anggaran. Ketidaklengkapan ini dapat menimbulkan bias dalam evaluasi dan membuat rekomendasi kebijakan kurang relevan dengan realitas di lapangan, menandakan bahwa evaluasi yang dilakukan masih bersifat umum dan belum cukup

mendalam untuk mendukung perbaikan jangka panjang.

Kurangnya informasi yang akurat dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) menjadi hambatan utama dalam mengevaluasi dampak kebijakan terhadap perekonomian lokal. Laporan evaluasi yang disusun oleh BALITBANGDA hanya mencakup pemantauan umum tanpa data kuantitatif yang relevan, seperti perubahan pendapatan petani, efisiensi produksi, atau dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Hal ini menyebabkan evaluasi kebijakan masih bersifat deskriptif, tanpa analisis yang mendalam. Minimnya data yang akurat menghambat pengambilan keputusan yang berbasis bukti, menyulitkan pemerintah daerah dalam menilai keberhasilan program dan merumuskan kebijakan selanjutnya. Untuk memastikan kebijakan SIDA lebih efektif, evaluasi harus didasarkan pada data yang lebih terperinci dan kuantitatif, agar dampak kebijakan dapat diukur secara objektif dan mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

### **3. Allocation analysis**

#### **Efektivitas Pengalokasian Anggaran**

Berdasarkan wawancara dengan petani apel di Desa Gubuklakah, sebagian besar petani merasa tidak merasakan manfaat dari bantuan dana yang disalurkan pemerintah. Program subsidi pupuk yang diberikan hanya berlangsung singkat dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak cukup mendukung keberlanjutan usaha pertanian. Meskipun pemerintah melalui program SIDA mengalokasikan anggaran untuk mendukung pertanian apel, salah satu bentuknya adalah subsidi pupuk yang dimulai sejak 2017, namun banyak petani yang beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Ketidakefektifan alokasi dana ini mencerminkan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan, karena tidak dapat mempertahankan minat petani untuk terus mengembangkan pertanian apel, sehingga tujuan awal program tidak tercapai secara optimal.

Efektivitas pengalokasian anggaran dalam kebijakan publik bergantung pada dampak jangka panjang yang dihasilkan. Pada kasus SIDA di Desa Gubuklakah, meskipun subsidi pupuk diberikan untuk meningkatkan produktivitas apel, kebijakan ini tidak berkelanjutan. Akibatnya, petani kesulitan mendapatkan pupuk murah, meningkatkan biaya produksi, dan banyak yang beralih ke komoditas lain. Kebijakan yang kurang mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi mengurangi efektivitasnya. Untuk meningkatkan hasil, kebijakan perlu didukung oleh program berkelanjutan, pendampingan, dan evaluasi berkala agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan petani dan memberi dampak lebih luas.

### **Penggunaan Teknologi**

Evaluasi program Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Desa Gubuklakah masih dilakukan dengan metode konvensional tanpa dukungan sistem digital terintegrasi. Laporan evaluasi disusun secara manual dan dipantau setiap bulan, dengan perangkat sederhana seperti Microsoft Word untuk laporan akhir tahunan. Penggunaan teknologi modern dalam evaluasi program dapat meningkatkan akurasi dan relevansi data, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam evaluasi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaporan dan analisis data, yang dapat menghambat transparansi dan ketepatan waktu dalam menyampaikan hasil serta rekomendasi program. Kebijakan publik yang efektif seharusnya dapat mengadopsi teknologi untuk memberikan evaluasi yang lebih menyeluruh dan mudah diakses oleh semua pihak terkait.

### **4. Multiple and conflicting**

#### **Proses Pengambilan Keputusan Yang Saling Bertentangan Antara Pemangku Kepentingan dan Petani**

Dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, sering muncul perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah Desa Gubuklakah berusaha meningkatkan produktivitas apel dengan menerapkan metode pertanian modern, termasuk memberikan pelatihan kepada petani. Namun, banyak petani yang merasa bahwa metode baru tersebut terlalu rumit dan tidak seefektif cara tradisional yang sudah mereka terapkan. Menurut teori Stuart S. Nagel, ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat ini menciptakan konflik kepentingan, karena kebijakan yang diterapkan tidak selalu selaras dengan preferensi dan kondisi nyata masyarakat sasaran.

Konflik kepentingan dalam kebijakan SIDA di Desa Gubuklakah terjadi karena pemerintah mendorong penggunaan teknologi pertanian modern, sementara petani lebih memilih metode tradisional dan mengutamakan subsidi pupuk untuk menjaga produktivitas apel. Kenaikan harga pupuk tanpa dukungan berkelanjutan menyebabkan banyak petani beralih ke komoditas lain. Ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan petani menghambat keberhasilan program. Oleh karena itu, kebijakan perlu lebih inklusif dengan mempertimbangkan insentif ekonomi, subsidi yang stabil, dan akses mudah terhadap teknologi agar dapat diterima dan diterapkan oleh petani.

### **5. Multiple prediction**

#### **Analisis Kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)**

Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian apel di Desa Gubuklakah, pemerintah melalui program SIDA menawarkan pelatihan berbasis teknologi modern dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Namun, kenyataannya, petani yang sudah terbiasa dengan metode tradisional merasa kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan, terutama jika tidak mempertimbangkan kesiapan dan respons dari kelompok sasaran yang menjadi objek implementasi.

Pendekatan Multiple Prediction dalam evaluasi kebijakan memungkinkan analisis berbagai kemungkinan hasil dari implementasi kebijakan, seperti dalam program Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Desa Gubuklakah. Terdapat dua skenario yang dapat diprediksi berdasarkan respons petani: pertama, jika pemerintah terus mendorong penerapan teknologi modern tanpa mempertimbangkan kebutuhan petani akan subsidi pupuk, adopsi inovasi akan tetap rendah, yang dapat menghambat efektivitas program. Kedua, jika kebijakan disesuaikan dengan memberikan subsidi pupuk dan mengenalkan teknologi secara bertahap, penerimaan petani terhadap inovasi dapat meningkat, meningkatkan daya saing produk apel dan memastikan keberlanjutan program. Dengan menggunakan pendekatan ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif, mengatasi kendala yang mungkin timbul, serta meningkatkan dampak positif program SIDA terhadap sektor pertanian di Desa Gubuklakah.

## Kesimpulan

1. Inefisiensi Sumber Daya: Kebijakan SIDA di Desa Gubuklakah menunjukkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya, terutama terkait rendahnya adopsi teknologi pertanian dan ketidakberlanjutan subsidi pupuk. Metode tradisional yang terus diterapkan tidak mampu mengoptimalkan produktivitas, diperparah dengan kenaikan harga pupuk dan kurangnya pendampingan teknologi yang efektif.
2. Kurang Efektif dalam Mencapai Tujuan: Efektivitas kebijakan SIDA tergolong rendah karena belum mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi petani. Indikatornya adalah tingginya alih fungsi lahan akibat menurunnya produktivitas apel. Program pelatihan dan pengembangan pertanian yang tidak berlanjut juga menghambat petani dalam mengadopsi metode budidaya modern.
3. Ketidakberlanjutan Program: Kebijakan SIDA mengalami masalah keberlanjutan yang signifikan. Program subsidi pupuk dan pelatihan teknologi pertanian yang hanya berjalan dalam kurun waktu terbatas (2017-2019) menyebabkan petani kesulitan dan akhirnya beralih ke

komoditas lain. Penghentian program secara tiba-tiba menunjukkan lemahnya mekanisme untuk mempertahankan dampak jangka panjang.

4. Keterbatasan Informasi Data: Evaluasi kebijakan SIDA terkendala oleh kurangnya informasi data yang akurat dan komprehensif. Laporan evaluasi cenderung bersifat deskriptif dan minim analisis kuantitatif mengenai dampak kebijakan terhadap perekonomian lokal dan produktivitas petani. Ketidadaan data spesifik menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti yang efektif.
5. Pengalokasian Sumber Daya yang Kurang Optimal: Alokasi anggaran, terutama untuk subsidi pupuk, dinilai kurang efektif karena tidak berkelanjutan dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi petani. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi juga masih terbatas, menghambat akurasi, transparansi, dan pengambilan keputusan yang tepat waktu.
6. Konflik Kepentingan dan Prediksi Hasil yang Bervariasi: Terdapat konflik kepentingan antara pemerintah yang mendorong inovasi modern dengan petani yang lebih mengutamakan kebutuhan ekonomi jangka pendek, seperti subsidi pupuk. Analisis prediksi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan SIDA sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, mengakomodasi kebutuhan petani, dan merancang implementasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas, maka peneliti berusaha memberikan masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kabupaten Malang. Masukan tersebut antara lain:

1. Pendekatan Berbasis Data yang Komprehensif: Pemerintah daerah perlu menerapkan pendekatan berbasis data yang lebih komprehensif dalam kebijakan perencanaan SIDA. Data yang akurat dan relevan mengenai kondisi petani, efektivitas teknologi, dan dinamika pasar sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
2. Insentif yang Menarik: Memberikan insentif yang lebih menarik bagi petani untuk beralih ke sistem pertanian modern. Insentif ini dapat berupa subsidi pupuk, bantuan modal, atau pelatihan intensif dengan jaminan pasar.
3. Peningkatan Akses Teknologi: Meningkatkan akses petani terhadap teknologi yang lebih mudah diterapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan yang lebih praktis, meningkatkan

- teknologi di lapangan, serta memfasilitasi akses terhadap kredit untuk pembelian teknologi pertanian.
4. Diversifikasi Produk: Mendorong diversifikasi produk berbasis apel. Ini dapat membantu mengurangi kemandirian petani pada satu jenis produk dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.
  5. Kebijakan Stabilisasi Harga: Menerapkan kebijakan stabilisasi harga untuk melindungi petani dari tepian harga yang merugikan. Kebijakan ini dapat berupa penetapan harga dasar, subsidi harga, atau pengaturan tata niaga yang lebih baik.
  6. Kemitraan dengan Industri: Membangun kemitraan dengan industri untuk memastikan pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian apel. Kemitraan ini dapat berupa kerjasama dalam pengolahan, pemasaran, atau pengembangan produk turunan apel.
  7. Peningkatan Partisipasi Petani: Meningkatkan partisipasi petani dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait program SIDA. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan petani dalam forum diskusi, konsultasi publik, atau pembentukan kelompok tani yang lebih kuat.
  8. Evaluasi dan Monitoring Berkala: Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program SIDA. Hasil evaluasi ini harus digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan program yang ada agar lebih efektif dan efisien.
  9. Penguatan Kelembagaan Petani: Mengukuhkan kelembagaan petani, seperti kelompok tani atau koperasi. Kelembagaan yang kuat dapat membantu petani dalam mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar.
  10. Peningkatan Kapasitas SDM: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani, penyuluh pertanian, serta pengelola program SID
- Membentuk Sikap dan Kepribadian Siswa. CIVICUS: Pendidikan Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6(2), 45-54.
- Rahmawati, & Haryanto. (2020). Efektivitas Program Peningkatan Produktivitas Pertanian. *Jurnal Agronomi Indonesia*, hlm. 98.
- Ridwan, M. et al. (2021) Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah, *Jurnal Masohi*.
- Setiawan. (2018). Potensi Pertanian Apel di Kabupaten Poncokusumo. *Jurnal Pertanian Indonesia*, Vol.02.
- Suharto et al. (2024). Dampak Perubahan Iklim dan Ketidakstabilan Harga terhadap Pertanian Apel. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 07.
- Anto, R.P. et al. (2024) *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Penerapannya*. Sukoharjo: Tahta Media
- Ariefin, Y. et al. (2022) *Pengantar Ilmu Pertanian*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fiantika et al. (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Miles, M.H (2014) *Qualitatif Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition Sage Publication.
- Moleong (2014) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda.
- Nagel, S.S. (1984) *Public Policy goals, means, and methods*. Amerika: Library of Congress.
- Nagel, S.S. (2001) *Handbook of Public Policy Evaluation*. Amerika: Sage Publications.
- Nasution (2023) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Purba, D.W. et al. (2020) *Pengantar Ilmu Pertanian*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rahim, R. et al. (2021) *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Sugiono (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7D*. Bandung: Alfabeta
- ### Daftar Pustaka
- Anggara & Ainurrajjid. (2017). Kendala mill)var. Manalagi Produksi DI Desa Apel (Malus Poncokusumo Malanng. *Jurnal Produksi Tanaman*. Vol.5 No.2.
- Kaya. (2014). Pengaruh Pupuk Organik Dan Pupuk NPK Terhadap PH Dan K Tersedia Tanah Serta Serapan. *Jurnal Buana Sains*. Vol.14 No.2.
- Kuntari, Madiyanto. (2019). Pemulihan Tanaman Apel Di Desa Gubuklakah Poncokusumo. *Jurnal Malang Kabupaten*.
- Mutmainah, D. &. (2018). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan. *Kewarganegaraan Dalam*